



## BAB VI

### KESIMPULAN

#### 6.1 Simpulan

Dalam bab I disampaikan bahwa tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa peran serta masyarakat sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 7 Tahun 2011 yang tertera pada bab VIII pasal 36. Peran serta masyarakat tersebut diteliti dikecamatan Coblong khususnya kelurahan Lebak Siliwangi dan lebih difokuskan kepada taman Sangkuriang yang diresmikan diawal tahun 2016.

Pada tahap perencanaan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan sama sekali tidak melibatkan peran serta dari masyarakat Lebak Siliwangi. Perencanaan sepenuhnya berada ditangan pemerintah dalam penyusunan masterplan, penyusunan kebijakan desain tekhnis, dalam penyusunan kebijakan besaran biaya serta penjadwalan pembangunan RTH yaitu taman Sangkuriang. Menurut teori yang dikemukakan Arenstein, tidak diikuti sertakan nya masyarakat didalam perencanaan merupakan level paling bawah dari 8 tangga tahapan peran masyarakat yaitu level non-participation.

Pada tahapan pelaksanaan yang terdiri dari perencanaan dari pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan. Sesuai dengan fakta dilapangan, Diskamtam melalui kecamatan dan kelurahan berhasil meningkatkan peran serta masyarakat menjadi begitu dominan dalam proses pembangunan taman Sangkuriang, dalam hal ini konsep citizen power yang dikemukakan oleh Sherry Arenstei berjalan sesuai konsep bahwa pemerintah mencoba mensejajarkan posisi dengan masyarakat didalam proses pembangunan taman Sangkuriang ini.

Dalam tahapan pengawasan dan pengendalian peran serta masyarakat hanya terjadi di dua kategori saja yaitu pemantauan dan evaluasi. Dalam kedua kategori tersebut peran serta masyarakat berada di level *citizen power* didalam konteks kemitraan dan *monitoring* berada di level pertengahan yaitu tokenism di konteks informasi, informasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait hal yang berhubungan dengan *monitoring*.

## 6.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat didalam pengelolaan RTH kecamatan Cobleng sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan upaya sosialisasi yang dilakukan masyarakat terhadap pengelolaan RTH khususnya taman Sangkuriang secara merata melalui media komunikasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan media komunikasi yang tepat didasarkan adanya perbedaan latar belakang pendidikan, usia, pekerjaan masyarakat. Selain itu, sosialisasi dilakukan agar masyarakat paham bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat begitu penting demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya sosialisasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
2. Memanfaatkan media sosial. Media sosial dapat dijadikan media untuk meningkatkan peran serta masyarakat didalam pengelolaan RTH dan meningkatkan nilai-nilai partisipatif yang terkandung didalamnya kepada masyarakat. Hal tersebut mengingat bahwa di era modern ini pengguna media

sosial jumlahnya banyak. Oleh karena itu, diharapkan melalui iklan musrenbang dalam media sosial (LINE, Twitter, Instagram, Facebook dll.)

3. Selain media sosial elektronik, pemanfaatan media cetak seperti koran harian, majalah, spanduk di jalan raya juga dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
4. Selain itu, dari pemerintah Kecamatan sendiri perlu melakukan penyuluhan langsung terhadap masyarakat demi meningkatnya peran serta mereka didalam pengelolaan RTH. Penyuluhan ini dilakukan secara berkelanjutan dan serempak di setiap daerah. Tentunya penyuluhan dikemas dengan menarik, misalnya bagi peserta yang hadir disediakan doorprize atau reward lainnya. Selain itu, waktu pelaksanaan juga disesuaikan dengan waktu luang masyarakat, misalnya pada hari libur, akhir pekan, sore hari, atau malam hari.
5. Perlu adanya peningkatan sosialisasi atas jadwal pelaksanaan pengelolaan RTH demi meningkatkan peran serta masyarakat yang dimulai dari tingkat RW. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tahu secara pasti mengenai jadwal pelaksanaanya. Dengan demikian diharapkan, masyarakat mampu mempersiapkan diri dan meluangkan waktu untuk ikut menjadi partisipan dalam pengelolaan RTH. Sosialisasi terkait waktu pelaksanaan ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, media cetak, media elektronik, dan penyuluhan
6. Membentuk tim khusus scrupa humas terkait musrenbang yang memiliki fungsi mensosialisasikan musrenbang kepada seluruh lapisan masyarakat.
7. Memberikan informasi mengenai program-program yang terpilih dan akan direalisasikan secara transparan. Selain itu, informasi daftar program

pembangunan yang akan direalisasikan disajikan beserta alasan terealisasinya program tersebut. Kemudian adanya program tentang pengelolaan yang diusulkan masyarakat yang direalisasikan, diharapkan mampu membuat sense of belonging masyarakat semakin positif. Selain itu, keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang kegiatan pembangunan yang dihasilkan, akan meminimalisir kekecewaan dan penantian dalam ketidakpastian yang dialami masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Horoepoetri A. 2009. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta. Rineka Cipta.

Suryono S. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta. CV Rajawali.

Arnstein, S.R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation." Dalam American Institute of Planners Journal, July.

Rahardjo, S dkk. 2000. Berbagai Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perluasan Wilayah Tutupan pada Daerah Permukiman di Depok. Yogyakarta. UGM.

Heeks R. 1999. The Tyranny of Participation in Information Systems. Institute for Development Policy and Management. Manchester.

Handayani, S. (2006). Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. Solo: Kompip

UNDP, 1997, Governance for Sustainable Human Development, United Nations Development Programme

### B. JURNAL

Akadun. (2011). Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipas Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Jurnal Mimbar Vol. XXVII No.2 .

Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. American Institute of Planners Journal.

Alwi Hasyim, 2006, "Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah", Jurnal Analisis Administrasi Dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1.

Ayum A. 2016, "Analisis Konsep Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu", Jurnal Ilmu Pemerintahan

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.

Suwignyo. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Undip, Semarang. Halaman.35

Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. UGM Press. Yogyakarta.

Iskandar, J. (2001). Teori dan Isu Pembangunan. Jurnal Uniga

Dwiningrum, S. I. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budi W. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta, Center of Academic Publishing Service

### **C. DOKUMEN**

Peraturan Daerah Nomer 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

Rekapitulasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Sampai Tahun 2016

Data Taman Di Kota Bandung 2016

Data Taman Tematik Kota Bandung 2016

Laporan Data Penduduk Kota Bandung Kecamatan Coblong berdasarkan

Agama

Laporan Data Penduduk Kota Bandung Kecamatan Coblong berdasarkan

Jenis Mata Pencaharian

Laporan Data Penduduk Kota Bandung Kecamatan Coblong berdasarkan

Jenis Kelamin

Laporan Data Penduduk Kota Bandung Kecamatan Coblong berdasarkan

Umur per-kecamatan

Laporan Data Penduduk Kota Bandung Kecamatan Coblong berdasarkan

Luas Wilayah Per-kecamatan

### **DOKUMEN DINAS DAN KECAMATAN**

Visi dan Misi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung